

# **1 BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

### **1.4 Sistematika**

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB IV. PENUTUP**

## **2 BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Evaluasi Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Pajangan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Pajangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100,000,000	-	-	-	-	-	-	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100,000,000	-	-	-	-	-	-	
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	Event	1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	35,000,000	10.43	3,650,000	39.50	13,825,000	39.50	39.50	
04.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	35,000,000	10.43	3,650,000	39.50	13,825,000	39.50	39.50	
04.01.04.56.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1	35,000,000	-	3,650,000	-	13,825,000	-	39.50	1. Pelaksanaan kegiatan menggunakan SHBJ Kabupaten. 2. Proses redesain anggaran yang lama. 3. Penangguhan Hoinor Tim karena berlakunya peraturan yang baru.
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Dokumen	1		-		1		100		

7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	80	2,846,051,473	21.36	608,056,748	81.69	1,476,578,862	102.11	51.88	
X.XX.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	6,000,000	29.17	1,750,000	55.83	3,350,000	55.83	55.83	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	3,000,000	1	1,000,000	2	1,850,000	40.00	61.67	
X.XX.01.2.01,07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	3,000,000	1	750,000	2	1,500,000	40.00	50.00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	80	2,332,374,219	21.71	506,379,808	52.46	1,223,676,891	65.58	52.46	

X.XX.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	20	2,274,284,219	16	490,944,808	20	1,194,306,891	100.00	52.51	
X.XX.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	53,090,000	3	14,210,000	6	27,170,000	50.00	51.18	
X.XX.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	22	5,000,000	3	1,225,000	11	2,200,000	50.00	44.00	
<b>X.XX.01.0 2.5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>angka</b>	<b>100</b>	<b>3,360,000</b>	<b>37.05</b>	<b>1,245,000</b>	<b>56.03</b>	<b>1,882,500</b>	<b>56.03</b>	<b>56.03</b>	
X.XX.01.0 2.5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	3,360,000	1	1,245,000	2	1,882,500	50.00	56.03	



<b>X.XX.01.0 2.6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum</b>	<b>angka</b>	<b>80</b>	<b>153,112,704</b>	<b>21.04</b>	<b>32,210,300</b>	<b>51.68</b>	<b>79,131,660</b>	<b>64.60</b>	<b>51.68</b>	
X.XX.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2,997,030	-	157,300	2	1,938,880	50.00	64.69	
X.XX.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	24,999,010	1	7,094,500	2	15,918,720	50.00	63.68	
X.XX.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	10,597,000	1	1,890,500	2	5,366,000	50.00	50.64	
X.XX.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	9,005,664	1	4,009,500	2	6,058,000	50.00	67.27	
X.XX.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1,500,000	3	3	6	540,000	50.00	36.00	

X.XX.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65	96,464,000	52	16,425,000	55	41,760,060	84.62	43.29	
X.XX.01.2 .06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5,000,000	-	2,363,500	1	5,000,000	100.00	100.00	
X.XX.01.2 .06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2,550,000	-	-	1	2,550,000	100.00	100.00	
<b>X.XX.01.0 2.7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>27,116,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>27,050,000</b>	<b>100</b>	<b>99.76</b>	
X.XX.01.2 .07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	9,816,000	-	-	3	9,750,000	100.00	99.33	
X.XX.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	17,300,000	-	-	5	17,300,000	100.00	100.00	
<b>X.XX.01.0 2.8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>angka</b>	<b>81</b>	<b>158,424,900</b>	<b>25.48</b>	<b>40,361,340</b>	<b>81.69</b>	<b>68,593,311</b>	<b>81.69</b>	<b>43.30</b>	

X.XX.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	19,200,000	3	4,650,410	6	9,409,996	50.00	49.01	
X.XX.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	12,980,000	1	4,550,000	2	7,190,000	50.00	55.39	
X.XX.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	126,244,900	5	31,160,930	5	51,993,315	100.00	41.18	
<b>X.XX.01.0 2.9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>165,663,650</b>	<b>16.51</b>	<b>27,355,300</b>	<b>44.00</b>	<b>72,894,500</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	

X.X.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	115,257,500	2	27,355,300	4	56,653,500	50.00	49.15	
X.X.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	3	50,406,150	-	-	1	16,241,000	33.33	32.22	
<b>07.01.2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>29,025,000</b>	<b>0.99</b>	<b>5,837,500</b>	<b>64.13</b>	<b>18,612,500</b>	<b>64.13</b>	<b>64.13</b>	
<b>07.01.02. 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan</b>	<b>persen</b>	<b>90</b>	<b>20,025,000</b>	<b>14.17</b>	<b>2,837,500</b>	<b>54.87</b>	<b>10,987,500</b>	<b>54.87</b>	<b>54.87</b>	
07.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	7,100,000	1	1,775,000	2	3,550,000	50.00	50.00	

07.01.02. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	7	12,925,000	1	1,062,500	4	7,437,500	57.14	57.54	
<b>07.01.02. 2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>9,000,000</b>	<b>33.33</b>	<b>3,000,000</b>	<b>84.72</b>	<b>7,625,000</b>	<b>84.72</b>	<b>84.72</b>	
07.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	9,000,000	1	3,000,000	2	7,625,000	100.00	84.72	
<b>07.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>98,830,000</b>	<b>28.73</b>	<b>28,392,500</b>	<b>56.25</b>	<b>55,595,000</b>	<b>56.25</b>	<b>56.25</b>	
07.01.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	persen	100	65,310,000	42.17	27,542,500	63.68	41,590,000	63.68	63.68	

07.01.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	22,445,000	8	16,445,000	8	16,445,000	80.00	73.27	
07.01.03. 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	42,865,000	4	11,097,500	8	25,145,000	66.67	58.66	
<b>07.01.03. 02.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>88</b>	<b>33,520,000</b>	<b>2.54</b>	<b>850,000</b>	<b>41.78</b>	<b>14,005,000</b>	<b>41.78</b>	<b>41.78</b>	
07.01.03. 2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	5	33,520,000	1	850,000	3	14,005,000	60.00	41.78	
<b>07.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>121,776,500</b>	<b>2.06</b>	<b>2,510,000</b>	<b>6.67</b>	<b>8,127,500</b>	<b>6.67</b>	<b>6.67</b>	

07.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	persen	100	121,776,500	2.06	2,510,000	6.67	8,127,500	6.67	6.67	
07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	121,776,500	1	2,510,000	6	8,127,500	50.00	6.67	Anggaran Kas sebagian besar di Bulan Agustus untuk kegiatan Peringatan HUT RI Ke-78
07.01.5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	persen	100	11,925,000	-	-	-	-	-	-	
07.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	persen	100	11,925,000	-	-	-	-	-	-	

07.01.05. 2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	70	11,925,000	-	-	-	-	-	-	
<b>J U M L A H</b>					<b>3,242,607,973</b>		<b>648,446,748</b>		<b>1,572,738,862</b>	-	<b>48.50</b>	



Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pada Pelaksanaan Kegiatan BKK dana Kistimewaan menggunakan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten bantul tahun 2023, sehingga perlu dilakukan redesain anggaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan yang mundur karena menyesuaikan dengan kegiatan tingkat kabupaten;
- c. Masih ada penempatan anggaran kas yang belum sesuai dengan kebutuhan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

### **3 BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja **.....\*** (*diisikan sesuai nama Perangkat Daerah yang bersangkutan*) Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Ca ta ta n Pe nt in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/  Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get			
						Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesu dah	Seb elum	Ses uda h										
2																					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																					
2	2	2											100,000,000	100,000,000				250,000,000			
2	2	0	8										100,000,000	100,000,000				250,000,000			
2	2	0	5.	07									100,000,000	100,000,000				250,000,000			
2	2	0	5.	06	Gelar Budaya Jogja	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Event	1 Even t	100 Per sen	100 Per sen	100,000,000	100,000,000	Dana Keistimewaan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 Per sen	150,000,000
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																					
4	0	1											35,000,000	35,000,000				50,000,000			

4	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>										35,000,000	35,000,000		50,000,000			
4	0	0	5.		<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>										35,000,000	35,000,000		50,000,000			
4	0	0	5.	0	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Per sen	100 Per sen	35,000,000	35,000,000	Dana Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Per sen	50,000,000
	1	4	06	1			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025					1 Dokumen	1 Dokumen								
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7	0				<b>KECAMATAN</b>										3,107,607,973	3,101,847,873		3,780,182,362			
7	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										2,852,051,473	2,851,768,873		3,206,718,362			
7	0	0	2.		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										6,000,000	6,000,000		10,000,000			

7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	6,000,000
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>				<b>10,000,000</b>
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	4,000,000
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>2,332,374,219</b>	<b>2,325,374,219</b>				<b>2,444,018,362</b>
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	20 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	100 Persen	100 Persen	2,274,284,219	2,267,284,219	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,388,018,362

7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	53,090,000	53,090,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	50,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	6,000,000
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											3,360,000	3,360,000			5,000,000	
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 Angka	81 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3,360,000	3,360,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5,000,000
7	0	0	2.		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											153,112,	167,073,			266,600	

	1	1	06												704	812					,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	2,997,030	2,997,030	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	21,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	24,999,010	23,249,010	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	36,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	10,597,000	13,985,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	26,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	9,005,664	10,703,772	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 angka	20,000,000

																		(AKIP)			
7	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	1,600,000
7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	116 Laporan	124 Laporan	100 Persen	100 Persen	96,464,000	107,089,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	150,000,000
7	01	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	7,000,000



7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2,550,000	2,550,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>27,116,000</b>	<b>27,116,000</b>				<b>85,000,000</b>
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	3 Unit	3 Unit	100 Persen	100 Persen	9,816,000	9,816,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	25,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	6 Unit	6 Unit	100 Persen	100 Persen	17,300,000	17,300,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	60,000,000
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>158,424,900</b>	<b>161,379,500</b>				<b>188,000,000</b>

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	19,200,000	23,700,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	36,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	12,980,000	11,780,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	32,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	126,244,900	125,899,500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	120,000,000
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>165,663,650</b>	<b>155,465,342</b>			<b>198,100,000</b>	

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	8 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	115,257,500	121,220,300	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	115,100,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	81 angka	3 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	50,406,150	34,245,042	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	83,000,000	
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											<b>29,025,000</b>	<b>29,025,000</b>				<b>95,464,000</b>	
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>													<b>20,025,000</b>	<b>20,025,000</b>			<b>70,000,000</b>

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	4 Laporan	4 Laporan	89 Persen	89 Persen	7,100,000	7,100,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	30,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	89 Persen	89 Persen	12,925,000	12,925,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	40,000,000
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>											9,000,000	9,000,000				<b>25,464,000</b>
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	9,000,000	9,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	25,464,000

7	0	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										<b>98,830,000</b>	<b>93,352,500</b>		<b>295,000,000</b>			
7	0	0	2.		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										<b>65,310,000</b>	<b>62,910,000</b>		<b>245,000,000</b>			
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Perse n	89 Perse n	10 Lembaga Kema syara katan	8 Lem baga Kem asyar akat an	89 Per sen	89 Per sen	22,445,000	16,445,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupa n Pembe rdayaa n Kepada Masyar akat	89 Per sen	200,000,000
7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Perse n	89 Perse n	20 Lapo ran	24 Lapo ran	89 Per sen	89 Per sen	42,865,000	46,465,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupa n Pembe rdayaa n Kepada Masyar akat	89 Per sen	45,000,000
7	0	0	2.		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>										<b>33,520,000</b>	<b>30,442,500</b>		<b>50,000,000</b>			

7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	4 Laporan	4 Laporan	89 Persen	89 Persen	33,520,000	30,442,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	50,000,000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>											121,776,500	121,776,500				73,000,000
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>											121,776,500	121,776,500				73,000,000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	5 Laporan	5 Laporan	89 Persen	89 Persen	121,776,500	121,776,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	89 Persen	73,000,000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>											11,925,000	11,925,000				120,000,000

7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										11,925,000	11,925,000		120,000,000			
7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										11,925,000	11,925,000		120,000,000			
7	0	0	2.	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	100 Perse	100 Perse	100 Oran	100 Oran	89 Per sen	89 Per sen	11,925,000	11,925,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Per sen	120,000,000
<b>TOTAL</b>															<b>3,242,607,973</b>	<b>3,236,847,873</b>		<b>4,080,182,362</b>			

#### 4 BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Panewu Pajangan,



ANJAR ARINTAKA PUTRA , S.Sos, MM  
Pembina Tk. I - IV/b  
NIP. 197101101990031002